

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena sektor ini menyerap sumber daya manusia yang paling besar dan merupakan sumber pendapatan mayoritas penduduk Indonesia. Peranan sektor pertanian di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pemerintah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan dititik beratkan pada sektor pertanian (Soekartawi, 1995).

Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian para pelaku usaha ini masih dihadapkan pada masalah klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan. Dalam jangka panjang kelangkaan modal bisa menjadi *entry point* terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani/pedesaan yang sulit untuk diputus (Hamid, 1986).

Ciri khas dari kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluarannya. Hasil produksi hanya diterima petani setiap musim sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak seperti kematian, pesta perkawinan dan selamatan lain. Petani kaya dapat menyimpan hasil panen untuk kemudian dijual sedikit demi sedikit pada waktu diperlukan sedangkan petani gurem (tidak berlahan dan penguasaan lahan sempit) masih kesulitan untuk menyimpan hasil (Mubiyarto, 1973).

Hadisapoetra (1973) *cit* Rusbina (2010) menjelaskan bahwa sebagian besar petani padi sawah merupakan masyarakat miskin atau berpendapatan rendah, rata-rata pendapatan rumah tangga petani masih rendah, yakni hanya sekitar 30% dari total

pendapatan keluarga. Selain berhadapan dengan rendahnya pendapatan yang diterima petani, petani padi juga dihadapkan pada keterbatasan modal untuk menjalankan usahatani serta penurunan produksi dan produktivitas hasil pertanian mereka. Untuk itu keberadaan kredit sangat dibutuhkan oleh petani guna melaksanakan kegiatan usahatani. Dengan adanya kredit nantinya petani dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan usahatani padi sawah mereka, hingga meningkatkan produksi dan pendapatan petani nantinya.

Sekitar 70% petani padi Indonesia terutama petani-petani gurem diklasifikasikan sebagai masyarakat miskin berpendapatan rendah. Keberadaan kredit benar-benar dibutuhkan oleh petani untuk tujuan produksi, pengeluaran hidup sehari-hari sebelum hasil panen terjual dan untuk pertemuan sosial lainnya. Dikarenakan penguasaan lahan tergolong sempit, upah yang mahal dan kesempatan kerja terbatas di luar musim tanam, sebagian besar petani tidak dapat memenuhi biaya hidupnya dari satu musim ke musim lainnya tanpa pinjaman. Kredit sudah menjadi bagian hidup dan ekonomi usahatani, bila kredit tidak tersedia tingkat produksi dan pendapatan usahatani akan turun drastis (Suryana, *dkk.*, 2001).

Sudaryanto (2000) *cit* Rozany (2006) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah kredit mikro. Masalah utama dalam penyediaan kredit ke petani gurem adalah adanya jurang pemisah antara penyaluran dengan penerimaan kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai skim kreditnya ditawarkan ke petani, tetapi pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu sedangkan petani kecil masih tetap kesulitan.

Menurut Umali (1978) *cit* Supriatna (2003), selama ini lembaga keuangan formal hanya memiliki sedikit perhatian kepada orang miskin pedesaan dalam hal memberikan pinjaman. Hal ini disebabkan karena : (a) petani tidak memiliki jaminan sertifikat tanah, (b) pembayaran secara bulanan tidak sesuai dengan usahatani padi yang memberikan siklus produksi musiman dan (c) petani kecil umumnya belum familier dengan prosedur administrasi yang rumit. Sekarang ini, lembaga formal

hanya dimanfaatkan oleh kelompok petani kaya seperti pemilik penggilingan padi, pedagang input produksi dan pelaku bisnis lainnya. Sebaliknya, petani kecil hanya dapat akses kepada lembaga kredit informal karena tidak mensyaratkan jaminan dan prosedur perolehan sangat mudah, meskipun lembaga ini menetapkan suku bunga yang tinggi antara 24%-80% persen per tahun.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi petani dan masyarakat pedesaan. Salah satu lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa jaminan, hubungannya yang cair (*personal relationship*), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (*negotiable repayment*). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di pedesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki aset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen) (Ashari 2006).

Para petani beranggapan bahwa lembaga ini memiliki prosedur administrasi sederhana, pencairan pinjaman cepat/tepat waktu sesuai kebutuhan tetapi dengan tingkat bunga lebih tinggi. Namun demikian, penilaian petani terhadap tingkat bunga sangat relatif. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa dengan kesediaan memberikan pinjaman lebih diartikan sebagai “bantuan” atau “pertolongan” terhadap mereka dalam mengatasi masalah pembiayaan usahatani (Hastuti, 2006), sehingga tingkat bunga yang harus dibayar lebih tinggi dianggap sebagai balas jasa dan merupakan hal yang wajar dan tidak memberatkan.

Salah satu diantara kebijakan alternatif yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usahatani khususnya usaha agribisnis sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan adalah Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP). Program ini terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Bapak

Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu Sulawesi Tengah (Departemen Pertanian, 2008).

Program PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat ini mempunyai fokus pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Oleh karena itu sebagai syarat utama PUAP adalah keberadaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kelembagaan pelaksana PUAP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota (Departemen Pertanian, 2008).

Pengalaman menunjukkan bahwa dana bantuan selama ini sulit digulirkan dan bahkan cenderung tidak produktif, karena tidak adanya lembaga yang mengelola keuangannya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A diharapkan sebagai lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani dan khususnya masyarakat miskin. LKM-A secara bertahap berkembang menuju lembaga keuangan mikro yang profesional, melalui pendampingan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping. Sasaran akhirnya adalah LKM-A yang berada dibawah naungan gapoktan menjadi lembaga keuangan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi Nagari dalam arti luas (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Gapoktan Agro Floris yang terletak di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah adalah salah satu gapoktan penerima dana BLM PUAP tahap I bersama gapoktan lain di Kota Padang. Menurut Penyelia Mitra Tani (PMT) Kota Padang, gapoktan ini termasuk kategori baik dalam perkembangan Gapoktan dan pengelolaan dana BLM PUAP di Kota Padang. Gapoktan Agro Floris mengelola dana BLM PUAP ini melalui unit usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) “Agro Floris Prima”.

## 1.2. Perumusan masalah

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani selama ini adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan yang umumnya masih lemah. Padahal ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan modal kerja maupun investasi merupakan syarat mutlak dalam usaha pertanian, sehingga usaha dapat berjalan dengan optimal dan tumbuh berkembang secara progresif dan kesejahteraan petani dapat ditingkatkan. Kebutuhan modal selama ini dapat berasal dari modal sendiri (*self financing*), bantuan pemerintah dalam bentuk modal bergulir (*support financing*), serta dari lembaga keuangan dalam bentuk pembiayaan (*external financing*).

Dalam menyikapi keterbatasan modal petani, pemerintah menjawabnya dengan program-program Pembangunan Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian di perdesaan yaitu program PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A ini nantinya diharapkan sebagai lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani dan khususnya masyarakat miskin, yang mana salah satu indikator keberhasilan PUAP ini adalah meningkatkan pendapatan petani, buruh tani dan rumah tangga tani melalui agribisnis sesuai potensi daerah (Departemen Pertanian, 2008).

Selama ini keberadaan lembaga keuangan formal dengan bunga kredit yang ringan cenderung sulit untuk diakses oleh petani. Hal ini dikarenakan banyaknya persyaratan yang diberikan untuk mendapatkan pinjaman, petani tidak mempunyai jaminan agar bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, prosedur peminjaman yang dianggap berbelit-belit oleh petani, dan pola pembayaran yang tidak sesuai dengan penerimaan usaha tani. Sehingga petani cenderung beralih ke lembaga keuangan informal untuk membantu permodalannya. Bantuan kredit dengan bunga rendah tersebut lebih banyak jatuh kepada kelompok dengan penghasilan menengah ke atas. Pihak-pihak yang mendapatkan kredit itu nantinya akan bertindak sebagai lembaga kredit informal bagi petani, dimana bantuan kredit yang mereka dapatkan itu nantinya akan dipinjamkan lagi kepada petani kecil dengan bunga yang tinggi.

BLM-PUAP yang nantinya akan dikelola oleh LKM-A merupakan solusi bagi masalah permodalan yang dihadapi petani selama ini. Diharapkan BLM-PUAP ini dapat dikelola oleh LKM-A secara berkelanjutan, serta keberadaan LKM-A yang dekat dengan lingkungan petani, dalam jangka panjang dapat terus membantu aspek permodalan, karena sulitnya petani untuk mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Gapoktan Agro Floris merupakan Gapoktan penerima dan pengelola dana PUAP bersama Gapoktan lain di Kota Padang (Lampiran 2). Gapoktan Agro Floris didirikan pada tanggal 31 Mei 2007 dengan jumlah kelompok tani sebanyak 12 kelompok dan 215 anggota (Lampiran 3), sedangkan LKM-A Agro Floris Prima dibentuk pada tanggal 13 April 2008 sebagai unit simpan pinjam dan pengelola keuangan Gapoktan Agro Floris. Anggota LKM-A penerima manfaat pada perguliran pertama BLM-PUAP adalah sebanyak 119 anggota yang berasal dari 8 kelompok tani yang tergabung dalam keanggotaan gapoktan dan LKM-A. Di Gapoktan Agro Floris rata-rata yang memanfaatkan dana BLM-PUAP ini adalah petani padi sawah. Semenjak digulirkannya dana BLM-PUAP kepada anggota LKM-A Agro Floris Prima, dana tersebut mengalami perkembangan sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 6, perkembangan modal usaha yang dikelola sampai bulan Mei 2012 sebanyak Rp.279.860.000,- termasuk didalamnya dana program BLM-PUAP sebesar Rp.100.000.000,-.

Adanya keterbatasan modal yang dialami oleh petani kecil merupakan sebuah tantangan besar yang harus ditangani. Dimana modal merupakan hal penting dalam pertanian, selama ini petani cenderung kekurangan modal untuk menjalankan usahanya. Di lain pihak, kondisi petani dengan segala keterbatasan membuatnya sulit mendapatkan bantuan kredit dari lembaga keuangan formal. Selain itu mekanisme peminjaman di lembaga keuangan formal dirasa terlalu berbelit belit oleh petani. Dengan adanya BLM-PUAP yang dikelola oleh LKM-A, maka LKM-A dapat memberikan kredit dengan syarat yang lebih mudah dan longgar kepada petani karena sifat LKM-A yang langsung berada di dekat petani, didirikan oleh petani, dikelola

oleh petani dan melayani petani, sehingga berperan sebagai lembaga alternatif untuk penyedia modal petani.

Berdasarkan uraian dan kondisi tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian guna mengetahui:

1. Apa saja aktivitas LKM-A Agro Floris Prima dalam melaksanakan BLM-PUAP ?
2. Sejauh mana manfaat BLM-PUAP yang dilaksanakan oleh LKM-A bagi usahatani padi sawah?

Untuk menjawab persoalan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang **"Analisis Manfaat Pelaksanaan BLM-PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis terhadap Usahatani Padi Sawah Anggota (Studi kasus: LKM-A Agro Floris Prima Gapoktan Agro Floris Kec. Koto Tengah Kota Padang)"**.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menganalisis manfaat yang dijalankan LKM-A Agro Floris Prima sebagai salah satu unit usaha otonom Gapoktan Agro Floris dalam mengelola dana BLM-PUAP bagi usahatani padi sawah anggota.

Secara rinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam BLM-PUAP oleh LKM-A Agro Floris Prima.
2. Menganalisis manfaat BLM-PUAP yang dilaksanakan oleh LKM-A bagi usahatani padi sawah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi :

1. Pemerintah, sebagai bahan evaluasi terhadap program yang sedang dijalankan, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan

menetapkan program-program dimasa yang akan datang, khususnya program-program penguatan modal atau pembiayaan pertanian, serta penumbuhkembangan dan memberdayakan LKM-A.

2. LKM-A Agro Floris Prima dan Gapoktan Agro Floris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan usaha-usahanya, sehingga kelompok tersebut dapat lebih berkembang dan mandiri dengan adanya bantuan dari pemerintah.
3. Mahasiswa dan atau peneliti selanjutnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang pembiayaan pertanian dan LKM-A.